



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN

JI. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: diskan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko oerganisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib mealakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengindentifikasi penyimpangan atas pelaksnanaan kegiatan dibandingan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2025 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang dibutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2025 di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Dinas Perikanan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern

Control Environment Evaluation (CEE)

No	Sub Unsur	Hasil Review Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpan	Perjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Memadai	Perlunya peringkatkan kapasitas dan peran aparat pengawas intern OPD	Memadai	OPD telah melaksanakan evaluasi kinerja tribulanan secara rutin, telah melakukan pemberian surat teguran dan peringatan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan memberikan arahan terkait capaian kinerja keterian aplikasi eperformance bagi pegawai yang tingkat keterian eperformance rendah	Memadai	Perlunya peringkatkan kapasitas dan peran aparat pengawas intern OPD OPD telah melaksanakan evaluasi kinerja tribulanan secara rutin, telah melakukan pemberian surat teguran dan peringatan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan memberikan arahan terkait capaian kinerja keterian aplikasi eperformance bagi pegawai yang tingkat keterian eperformance rendah
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau dilatipim	Memadai	OPD telah menyusun dan mengusulkan usulan kebutuhan dan rencana peringkatkan kapasitas pegawai dinas perikanan	Memadai	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau dilatipim OPD telah menyusun dan mengusulkan usulan kebutuhan dan rencana peringkatkan kapasitas pegawai dinas perikanan
3	KERIMPIPINAN YANG KONSEPtif	Memadai	Belum optimalknya peran pimpinan sebagai agen perubahan dan contoh yang baik	Memadai	Pimpinan telah memberikan kepemimpinan dan pembagian tugas dengan baik serta memberikan evaluasi terkait ketidaktepatan indikator kinerja	Memadai	Belum optimalknya peran pimpinan sebagai agen perubahan dan contoh yang baik Pimpinan telah memberikan kepemimpinan dan pembagian tugas dengan baik serta memberikan evaluasi terkait ketidaktepatan indikator kinerja
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	Diperlukan adanya peryesuaian terhadap struktur organisasi	Memadai	Struktur Organisasi dan dokumen peta jabatan telah dilakukan perbaikan dan peresuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku	Memadai	Diperlukan adanya perresuaian terhadap struktur organisasi Struktur Organisasi dan dokumen peta jabatan telah dilakukan perbaikan dan peresuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku
5	PENDELEGASIAN WENENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	Perlunya peringkatkan pemahaman terhadap target dan kinerja yang harus dicapai dan kewenangannya	Memadai	Pimpinan telah memberikan arahan serta pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pegawai	Memadai	Perlunya peringkatkan pemahaman terhadap target dan kinerja yang harus dicapai dan kewenangannya Pimpinan telah memberikan arahan serta pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pegawai
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memadai	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau dilatipim	Memadai	OPD telah menyusun dan mengusulkan usulan kebutuhan dan rencana peringkatkan kapasitas pegawai dinas perikanan	Memadai	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau dilatipim OPD telah menyusun dan mengusulkan usulan kebutuhan dan rencana peringkatkan kapasitas pegawai dinas perikanan
7	PERWILUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFektif	Memadai	Perlunya tindak lanjut dalam dokumen LHP secara menyeluruh	Memadai	Dokumen LHP telah disusun disertai dengan data dukung bukti perbaikan terhadap Laporan hasil pemeriksaan terkait OPD	Memadai	Perlunya tindak lanjut dalam dokumen LHP secara menyeluruh Dokumen LHP telah disusun disertai dengan data dukung bukti perbaikan terhadap Laporan hasil pemeriksaan terkait OPD
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	Peningkatan kualitas terhadap instansi terkait	Memadai	OPD telah melaksanakan kerjasama yang baik dengan instansi lain baik dari tahap perencanaan, penganggaran, dan juga evaluasi terhadap program dan legiitan Dinas Perikanan	Memadai	Peningkatan kualitas terhadap instansi terkait OPD telah melaksanakan kerjasama yang baik dengan instansi lain baik dari tahap perencanaan, penganggaran, dan juga evaluasi terhadap program dan legiitan Dinas Perikanan

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

1. Perlunya peningkatan evaluasi dan peningkatan kapasitas pegawai intern pengawas dalam OPD;
2. Peningkatan peran pimpinan sebagai agen perubahan dan pemberian contoh yang baik oleh pimpinan terhadap pengelolaan risiko sehingga memberikan masukan dalam penanganan terjadinya risiko OPD;
3. Peningkatan evaluasi terhadap kinerja penanggulangan risiko dan sisa risiko OPD yang terjadi;
4. Perlunya tindak lanjut dalam dokumen hasil LHP secara menyeluruh dan komprehensif.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda : Dinas Perikanan

Tahun Penilaian : 2025

Urusan Pemerintahan : Kelautan dan perikanan

No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
1	Laporan disiplin pegawai, laporan monev gratifikasi	Perlunya peningkatan kapasita dan peran aparat pengawas intern OPD	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Dokumen kebutuhan pengembangan karier pegawai	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau diklatpim	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Perjanjian Kinerja dan dokumen evaluasi kinerja tribulanan	Belum optimalnya peran pimpinan sebagai agen perubahan dan contoh yang baik	KEPIMPINAN YANG KONDUSIF
4	Dokumen petjabatan	Diperlukan adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
5	Dokumen perjanjian kinerja, dokumen cascading dan pohon kinerja	Perlunya peningkatan pemahaman terhadap target dan kinerja yang harus dicapai dan kewenangannya	PENDELEGAISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
6	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan karier SDM OPD	Adanya pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam pengembangan SDM baik melalui seminar atau diklatpim	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	Dokumen LHP Inspektorat terhadap OPD Didukung Dengan Tindak Lanjut	Perlunya tindak lanjut dalam dokumen LHP secara menyeluruh	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
8	Dokumen RKPD,Kamus Usulan Kegiatan,Dokumen Renja,dan Evaluasi Kinerja OPD	Peningkatan kualitas terhadap instansi terkait	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**". Tujuan Dinas Perikanan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu :

- 1. Meningkatkan Produksi Perikanan dan;**
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan**

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Dinas Perikanan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor Pembangunan Perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Risiko Strategis Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		
		Uraian		Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	% Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Cuaca/Iklim,Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Fishing Ground Semakin Jauh,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	R50.25.25.28.01	Kepala Dinas Perikanan	1. Iklim tidak menentu (Banjir) 2. Belum Optimalnya Frekuensi dan Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 3. Penangkapan Ikan Secara Berlebihan 4. Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Modern	Eksternal	UC	1. Berkurangnya Trip Melaut 2. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 3. Peningkatan biaya produksi 4. Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	
2	% peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	Rendahnya Penggunaan Benih Ikan Berkualitas,Tepat Ukuran,dan Hitungan,Hama Penyakit Ikan,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat),Ketersediaan Sarpras Budidaya	R50.25.25.28.02	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Penyediaan/Produksi Benih Ikan Berkualitas 2. Kurangnya Penyediaan/Produksi Benih Ikan Berkualitas 3. Budidaya masih bersifat tradisional 4. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	Eksternal	C	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 3. Budidaya ikan rawan serangan hama 4. Proses budidaya masih bersifat tradisional		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	
3	Indeks Harga Yang Diterima	Kurangnya diversifikasi/tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan,Biaya Produk Tinggi	R50.25.25.28.03	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produk olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah 3. Tingginya biaya sarana produksi perikanan	Eksternal	C	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran 3. Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah		Pelaku Usaha Perikanan	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Komitmen evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja	R50.25.25.28.04	Kepala Dinas Perikanan	1. Penerapan Manajemen SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan OPD perlu ditingkatkan 2. Akuntabilitas kinerja masih dianggap belum berperan dalam pengambilan kebijakan	internal	C	Turunnya Nilai Akuntabilitas OPD		Dinas Perikanan	

Tabel Matriks Risiko Operasional Dinas Perikanan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Didisediakan	Perencanaan	Resiko Kepatuhan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	R00.25.25.28.01	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Data sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap belum akurat	internal	C	Pemberian bantuan tidak optimal dan tepat sasaran	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Pelaksanaan	Resiko Kebijakan Adanya Kelompok Yang Belum Meningkat Kelas Kelompoknya	R00.25.25.28.02	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Administrasi Kelompok Belum Optimal	internal	C	Fasilitasi/Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	KUB (Kelompok Kelompok Usaha Bersama)
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	% Tempat Pelelangan Ikan Yang Memiliki SOP	Perencanaan	Resiko Kepatuhan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	R00.25.25.28.03	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Pengelolaan SOP Masih Tradisional	internal	C	Alur Pelayanan Pelelangan Ikan Belum Optimal	Nelayan
4	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil Yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (Orang/Pembudidaya)	Pelaksanaan	Resiko Kebijakan Adanya pembudidaya/kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses permodalan	R00.25.25.28.04	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Kelengkapan Persyaratan Berkas Kelompok Tidak memenuhi Syarat	Eksternal	C	Fasilitasi/Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	PODAKAN
5	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan	Pelaksanaan	Resiko Kepatuhan Masih tingginya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan	R00.25.25.28.05	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait Peraturan Perundang-Undangan Perikanan 2. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal	internal dan eksternal	C	Destroyive fishing dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan	Pelaku Usaha Perikanan

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

Analisa Risiko Strategis OPD							
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Perikanan	Cuaca/klim,Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Fishing Ground Semakin Jauh,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	RSO.25.25.28.01	18	Kepala Dinas Perikanan	1. Iklim tidak menentu (Banjir) 2. Belum Optimalnya Frekuensi dan Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 3. Penangkapan ikan Secara Berlebihan 4. Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Modern	1. Berkurangnya Trip Melaut 2. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 3. Peningkatan biaya produksi 4. Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
2	Dinas Perikanan	Rendahnya Penggunaan Benih Ikan Berkualitas,Tepat Ukuran,dan Hitungan,Hama Penyakit Ikan,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat),Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSO.25.25.28.02	19	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Penyediaan/Produksi Benih Ikan Berkualitas 2. Kurangnya Penyediaan/Produksi Benih Ikan Berkualitas 3. Budidaya masih bersifat tradisional 4. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 3. Budidaya ikan rawan serangan hama 4. Proses budidaya masih bersifat tradisional
3	Dinas Perikanan	Kurangnya diversifikasi/nilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan,Biaya Produksi Tinggi	RSO.25.25.28.03	16	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produk olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah 3. Tingginya biaya sarana produksi perikanan	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran 3. Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah
4	Dinas Perikanan	Komitmen evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja	RSO.25.25.28.04	13	Kepala Dinas Perikanan	1. Penerapan Manajemen SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan OPD perlu ditengkatkan 2. Akuntabilitas kinerja masih dianggap	Turunnya Nilai Akuntabilitas OPD

Adapun rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulir kertas kerja sebagai berikut :

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan						
Dinas Terkait	Dinas Perikanan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1 Cuaca/klim,Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Fishing Ground Semakin Jauh,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	RSO.25.25.28.01	Pemberian prediksi prakiraan cuaca BMKG,Penyediaan sarana alat tangkap,dilengkapi dengan teknologi	Masih tingginya penggunaan alat tangkap dilarang	Pendampingan pelaku usaha perikanan tangkap melalui sosialisasi dan pembinaan	Kepala Dinas Perikanan	Agustus	
2 Rendahnya Penggunaan Benih Ikan Berkualitas,Tepat Ukuran,dan Hitungan,Hama Penyakit Ikan,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat),Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSO.25.25.28.02	Pembinaan dan pengelolaan perikanan budidaya	Cukupan pemberian bantuan sarpras belum optimal	Optimalisasi BB,Pembinaan HSRT,Monev Kesehatan ikan dan Lingkungan	Kepala Dinas Perikanan	Agustus	
3 Kurangnya diversifikasi/lain tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan,Biaya Produksi Tinggi	RSO.25.25.28.03	Pelatihan olahan dan pendampingan pemrosesan hasil olahan perikanan	Biaya produksi tinggi dalam proses produksi tergantung variabel yang tidak menentu	Fasilitasi pemasaran melalui akses promosi dan pameran	Kepala Dinas Perikanan	September	
4 Komitmen evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja	RSO.25.25.28.04	Monev tribulanan	Belum diterapkannya reward dan punishment dalam kinerja OPD	Pemberian reward and punishment terhadap kinerja melalui surat edaran	Kepala Dinas Perikanan	September	

Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1 Resiko Kepatuhan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROO.25.25.28.01	Penyusunan dokumen pengembangan penyediaan sarana	Perlu dilakukan pembaharuan terkait rencana pengembangan sarana	Penyesuaian dokumen dengan kebutuhan pengembangan sarana	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Agustus
2 Resiko Kebijakan Adanya Kelompok Yang Belum Meningkat Kelas Kelompoknya	ROO.25.25.28.02	Pendampingan administrasi kelompok telah rutin dilaksanakan	Kurangnya kesadaran dalam administrasi pengelolaan kelompok	Monitoring dan evaluasi kelompok	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
3 Resiko Kepatuhan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	ROO.25.25.28.03	Penyusunan SOP terhadap TPI yang belum ber SOP	Kesusuaian SOP dengan Alur Pelayanan Yang Sudah Ada	Penyesuaian Alur Pelayanan agar disesuaikan dengan SOP	Kepala UPT Tempat pelelangan ikan	Agustus
4 Resiko Kebijakan Adanya pembudidaya/kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses permodalan	ROO.25.25.28.04	-	-	-	-	-
5 Resiko Kepatuhan Masih tingginya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan	ROO.25.25.28.05	Sosialisasi dan pemberian tanda larangan	Tanda larangan dicabut atau tidak dihiraukan	Pengawasan melibatkan aparat penegak hukum	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	September
6 Resiko Kemitraan Kelalaian dalam mendapatkan jaminan fungsionalitas dan operasional peralatan serta barang milik daerah Pabrik Es Tirta Maharani,Keterambatan penerimaan kontribusi hasil pengelolaan pabrik es tirta maharani setiap bulannya,Pembatalan Kontrak Kerjasama Sebelum Masa Berlaku Habis	ROO.25.25.28.06	Pengendalian dilakukan melalui koordinasi dan kunjungan periodik	-	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Pengelola	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Mei

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Rencangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2025					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Kebutuhan dan perikanan					
Dinas Terkait	Dinas Perikanan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:						
1	Pendampingan pelaku usaha perikanan tangkap melalui sosialisasi dan pemberian bantuan sarana perikanan tangkap	Laporan kegiatan BA Penyerahan kepada Kelompok NPHD	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juni	-	Belum terlaksana
2	Optimalisasi BB (Pembinaan HSRT) Monev Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Laporan kegiatan hasil pengujian	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Januari-Agustus	Januari-Mei	Telah dilaksanakan
3	Facilitasi pemasaran melalui akses promosi dan pameran	Laporan kegiatan transaksi selama pameran	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	April, Juli, September	April	Sudah terlaksana tahap 1
4	Pemberian reward and punishment terhadap kinerja melalui surat peringatan dan konfirmasi	Dokumen evaluasi kinerja Capaian Kinerja IKU-HD,Capaian evaluasi Renja OPD	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap 1

Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1	Penyesuaian dokumen dengan kebutuhan pengembangan sarana	penyandang dokumen rencana pengembangan dan kebutuhan di lapangan	Kepala Bidang perikanan Tangkap	Juni	-	Belum terlaksana
2	Monitoring dan evaluasi kelompok	Laporan kegiatan	Kepala Bidang perikanan Tangkap	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap 1
3	Penyesuaian Alur Pelayanan agar disesuaikan dengan SOP	Laporan hasil kegiatan	Kepala UPTRI	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap 1
4	-	-	-	-	-	-
5	Pengawasan melalukan aspek hukum	Laporan kegiatan	Kepala Bidang pengawasan	Maret, Juni, September, Desember	Maret	Sudah terlaksana tahap 1
6	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Pengelola. Pemberian surat pemberitahuan pengihinan dan teguran/Pembatalan Kontrak Kejamaan dan Penunjukan Pengambilan pengelolaan sementara	BA Rekon Asset Surat Resmi	Kepala Dinas Perikanan	Juli, November	Belum terlaksana	-
7	Pemilihan penyedia e katalog lebih setakif	Surat peranan melalui e katalog	Kasubag Umum	Maret	Belum terlaksana	Mundur, efisiensi anggaran

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan						
Dinas Terkait	Dinas Perikanan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1	Pendampingan pelaku usaha perikanan tangkap melalui sosialisasi dan pemberian bantuan sarana perikanan tangkap	Sosialisasi/verifikasi kepada KUB	Bidang Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (KUB)	April-Mei	Juni	Mundur dikarenakan ada perubahan jadwal efisiensi anggaran
2	Optimalisasi BBI,Pembinaan HSRT,Monev Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Brosur dan surat resmi	Bidang Perikanan Budidaya	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya (POKDAKAN)	Juli-September	-	Belum Terlaksana
3	Fasilitasi pemasaran melalui akses promosi dan pameran	Surat resmi dan Media sosial Dinas Perikanan	Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha Olahan Ikan (POKLAHSAR)	Juli-Augustus	-	Belum terlaksana
4	Pemberian reward and punishment terhadap kinerja melalui surat peringatan dan konfirmasi	Hasil evaluasi kinerja diserahkan	Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi	ASN Dinas Perikanan	Maret,Juni,September, Desember	Maret,Juni	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:							
1	Penyesuaian dokumen dengan kebutuhan pengembangan sarana	Dokumen perencanaan penyediaan alat tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Mei	-	Finalisasi
2	Monitoring dan evaluasi kelompok	Kunjungan lapangan melalui surat pemberitahuan resmi	Bidang Perikanan tangkap	KUB Perikanan Tangkap	Maret,Juni,September, Desember	Maret,Juni	Sudah dilaksanakan
3	Penyesuaian Alur Pelayanan agar disesuaikan dengan SOP	Sosialisasi dan Pemberian brosur alur pelayanan TPI sesuai SOP	Bidang Perikanan tangkap	Nelayan	April-November	April-Mei	Sudah Dilaksanakan
4	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengawasan melibatkan aparat penegak hukum	Dokumen MOU/Surat resmi permintaan kerjasama	Bidang Pengawasan	Aparat Penegak Hukum,Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,Agustus	Maret	Sudah terlaksana tahap I
6	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Pengelola ,Pemberian surat pemberitahuan penagihan dan teguran,Pembatalan Kontrak Kerjasama dan Penunjukan/Pengambilalihan pengelolaan sementara	Visi lapangan melalui surat resmi	Dinas Perikanan	Pihak Pengelola Pabrik Es	September	-	Finalisasi pengambilalihan

BAB IV

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Kesuksesan Pengendalian risiko strategis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Perikanan ke dalam matriks sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2025					
Tujuan Strategis Pemda		Kelautan dan perikanan					
Urusan Pemerintahan		Dinas Perikanan					
Dinas Terkait		Dinas Perikanan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:							
1	Pendampingan pelaku usaha perikanan tangkap melalui sosialisasi dan pemberian bantuan sarana perikanan tangkap	Sosialisasi/verifikasi kepada KUB	Bidang Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (KUB)	April-Mei	Juni	Mundur dikarenakan ada perubahan jadwal efisiensi anggaran
2	Optimalisasi BBI,Pembinaan HSRT,Monev Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Brosur dan surat resmi	Bidang Perikanan Budidaya	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya (POKDAKAN)	Juli-September	-	Belum Terlaksana
3	Fasilitasi pemasaran melalui akses promosi dan pameran	Surat resmi dan Media sosial Dinas Perikanan	Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha Olahan Ikan (POKLAHSAR)	Juli-Agustus	-	Belum terlaksana
4	Pemberian reward and punishment terhadap kinerja melalui surat peringatan dan konfirmasi	Hasil evaluasi kinerja diserahkan	Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi	ASN Dinas Perikanan	Maret,Juni,September, Desember	Maret,Juni	Sudah dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1	Penyesuaian dokumen dengan kebutuhan pengembangan sarana	Dokumen perencanaan penyediaan alat tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Mei	-
2	Monitoring dan evaluasi kelompok	Kunjungan lapangan melalui surat pemberitahuan resmi	Bidang Perikanan tangkap	KUB Perikanan Tangkap	Maret,Juni,September, Desember	Maret,Juni
3	Penyesuaian Alur Pelayanan agar disesuaikan dengan SOP	Sosialisasi dan Pemberian brosur alur pelayanan TPI sesuai SOP	Bidang Perikanan tangkap	Nelayan	April-November	April-Mei
4	-	-	-	-	-	-
5	Pengawasan melibatkan aparat penegak hukum	Dokumen MOU/Surat resmi permintaan kerjasama	Bidang Pengawasan	Aparat Penegak Hukum,Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,Augustus	Maret
6	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Pengelola ,Pemberian surat pemberitahuan penagihan dan teguran,Pembatalan Kontrak Kerjasama dan Penunjukan/Pengambilalihan pengelolaan sementara	Visit lapangan melalui surat resmi	Dinas Perikanan	Pihak Pengelola Fabrik Es	September	-
						Finalisasi pengambilalihan

BAB V

Rancangan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Perikanan, guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Penda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis Penda		Kebutuhan dan perkembangan				
Urusan Pemerintahan		Dinas Perikanan				
Dinas Terkait		Dinas Perikanan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:						
1	Pendampingan petaku usaha perikanan tangkap melalui sosialisasi dan pemberian bantuan sanan perikanan tangkap	Laporan kgiatan BA Penyekran kepada Kelompok NPHD	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juni	-	Belum terlaksana
2	Optimalisasi BBM/Pembinaan HSRT/Money Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Laporan kegiatan hasil pengujian	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Januari-Agustus	Januari-Mei	Telah dilaksanakan
3	Facilitasi pemasaran melalui akses promosi dan pameran	Laporan kegiatan transaksi selama pameran	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	April-Juli-September	April	Sudah terlaksana tahap I
4	Pemberian reward and punishment terhadap kinerja melalui surat peringatan dan konfirmasi	Dokumen evaluasi kinerja Capaian Kinerja IKU-IKD,Capaian evaluasi Renja OPD	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Renja OPD	Maret,Juni,September,Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap I

Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:						
1	Penyesuaian dokumen dengan kebutuhan pengembangan sarena	penyandangan dokumen rencana pengembangan dan kebutuhan di lapangan	Kepala Bidang perikanan Tangkap	Juni	-	Belum terlaksana
2	Monitoring dan evaluasi kelompok	Laporan kegiatan	Kepala Bidang perikanan Tangkap	Maret,Juni,September,Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap 1
3	Penyesuaian Alur Pelayanan agar disesuaikan dengan SOP	Laporan hasil kegiatan	Kepala UPTTPI	Maret,Jun,September,Desember	Maret	Sudah terlaksana Tahap 1
4	-	-	-	-	-	-
5	Pengawasan melibatkan aparat penegak hukum	Laporan kegiatan	Kepala Bidang pengawasan	Maret,Jun,September,Desember	Maret	Sudah terlaksana tahap 1
6	Evaluasi dan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Pengelola ,Pemberian surat pemberitahuan penugasan dan teguran,Pembatalan Kontrak Kejasaan dan Penunjukan Pengambilan pengetahuan sementara	BA,Rekon Asset,Surat Resmi	Kepala Dinas Perikanan	Juni,November	Belum terlaksana	-
7	Pemilihan penyedia e katalog lebih selektif	Surat peranan melalui e katalog	Kasubag Umum	Maret	Belum terlaksana	Mundur,efisiensi enggaran

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan.

